

## Kehidupan Gelandangan di Jakarta Tahun 1962-1977

Agustian Aditya Pratama ✉ & Wasino

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

*Diterima Juli 2023*

*Disetujui November 2023*

*Dipublikasikan Desember 2023*

*Keywords: Gelandangan,  
Sektor Informal,*

*Pemukiman Kumuh,  
Kebijakan Pemerintah*

### Abstrak

Jakarta pada awal tahun 1960-an telah mengalami perkembangan kota yang cukup besar. Proyek Mercusuar yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an awal telah membuat perpindahan penduduk desa ke Jakarta semakin sering terjadi. Penduduk yang datang ke Jakarta mayoritas merupakan para kaum miskin dan kurang memiliki keterampilan sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja di banyak sektor informal di Jakarta seperti tukang becak, pedagang kaki lima bahkan gelandangan. Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai gelandangan yang mulai bertambah di Jakarta pada tahun 1962-1977, serta tujuan dari penelitian ini untuk menemukan awal mula bertambahnya gelandangan di Jakarta serta strategi Pemerintah dalam menangani gelandangan.

### Abstract

*Jakarta in the early 1960s has experienced a fairly large urban development. The Lighthouse Project launched by President Soekarno in the early 1960s has made the migration of villagers to Jakarta more frequent. The majority of residents who come to Jakarta are poor and lack skills, which allows them to work in many informal sectors in Jakarta such as pedicab drivers, street vendors and even the homeless. The problem in this study discusses the increase in vagrants in Jakarta in 1962-1977, as well as the purpose of this study to find the beginning of the increase in vagrants in Jakarta and the Government's strategy in dealing with vagrants.*

© 2023 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Email: [agustian31@students.unnes.ac.id](mailto:agustian31@students.unnes.ac.id)

& [wasino@mail.unnes.ac.id](mailto:wasino@mail.unnes.ac.id)

ISSN 2252-6633

## PENDAHULUAN

Perkembangan Ibukota Jakarta antara tahun 1949-1962 membuat arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan terjadi secara masif. Daya tarik kota yang menampilkan kemegahan gedung-gedung, gemerlapnya lampu, keragaman gaya hidup, pendapatan yang lebih tinggi dari desa bahkan sampah yang bisa diuangkan (Singarimbun, 1977: 7). Di sisi lain perpindahan penduduk ini menjadi masalah tersendiri juga di perkotaan, mulai dari kemiskinan yang menimbulkan lingkungan kumuh hingga masalah kriminalitas (Harahap, 2013: 35). Dampak lain yang ditimbulkan bagi desa yaitu kekurangan sumber daya manusia bagi desa sehingga desa tidak dapat mengalami perkembangan yang nyata. Salah satu dampak dari munculnya pembangunan di Perkotaan yaitu munculnya gelandangan. Pekerjaan yang masih terbatas dan kurang di desa-desa melahirkan banyak pendatang ke wilayah perkotaan. Buruh kasar dan berpendidikan rendah berkaitan dengan taraf hidup yang rendah pula. Hal ini berkaitan pula melahirkan gejala gelandangan di kota (Onghokham, 1984:14). Dalam kehidupan kota, para gelandangan ini menciptakan persoalan seperti kesehatan dan persoalan fasilitas-fasilitas modern di kota.

Urbanisasi ini menjadi semakin populer setelah Indonesia merdeka, terutama setelah Ibukota Indonesia berpindah dari Yogyakarta menuju ke Jakarta pada tahun 1949. Berpindahnya Ibukota negara tersebut menyebabkan arus urbanisasi besar-besaran ke Jakarta pada tahun 1949. Jumlah penduduk Jakarta tercatat bertambah dari 823.356 pada tahun 1948 menjadi 1.340.625 pada tahun 1949 (Candiwidoro: 2017: 59). Jakarta menjadi sebuah simbol bagi bangsa yang baru merdeka dan dipandang dapat memberikan harapan kepada siapapun yang datang ke Jakarta (Candiwidoro: 2017: 59).

Tahun 1961 menandai babak baru bagi Kota Jakarta dikarenakan munculnya pembangunan besar-besaran yang terjadi di Jakarta yang melibatkan banyak buruh maupun para pekerja di sektor informal berpindah ke Jakarta. Menurut sensus penduduk Jakarta pada tahun 1961, jumlah penduduk Jakarta sewaktu itu berjumlah tiga juta orang bahkan lebih

dikarenakan ada yang tidak terdata (Biro Pusat Statistik, 1961). Saat itu tingkat pertumbuhan Jakarta diperkirakan empat sampai lima persen per tahun. Jakarta pada awal tahun 1960-an memiliki penduduk yang pesat pada saat itu dan memungkinkan tumbuhnya pemukiman baru. Pada tahun 1961 timbul permasalahan di Jakarta dari mulai sampah sampai dengan kriminalitas. Munculnya pendatang dari berbagai desa turut memperluas sektor informal di perkotaan (Soetomo, 2018: 2) seperti pedagang kecil, supir bus, tukang bensin eceran, penarik becak, buruh hingga pemulung (Lubis, 2018: 28). Imigran yang datang ke Jakarta juga lebih bervariasi dibanding tahun 1949. Masalah lain yang mulai muncul juga terkait dengan gelandangan di Jakarta pada waktu itu.

Keterbatasan keterampilan yang dibawa kaum pendatang inilah, akhirnya membuat masalah baru di Jakarta yang menjadi salah satu kota besar pada waktu itu. Salah satu fenomena yang muncul yaitu dengan adanya fenomena gelandangan di Ibukota. Masalah gelandangan merupakan masalah yang serius bagi pemerintah Jakarta, bahkan penanganan gelandangan sudah dimulai sejak tahun 1962 dengan adanya operasi teratai yang dilakukan Pemerintah menjelang Asian Games 1962 (Komariyah, 2016:1113). Namun nyatanya beberapa upaya yang dilakukan pemerintah seperti menangkap beberapa gelandangan lalu ditempatkan di luar kota tidak berbuah hasil. Gelandangan yang tertangkap nyatanya kembali lagi ke tempat dimana mereka melakukan aktivitas semula tersebut. Pada akhirnya pihak Pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan kebijakan besar-besaran terhadap beberapa gelandangan di Jakarta. Pemerintah mulai berpikir untuk melakukan upaya rehabilitasi terhadap para gelandangan tersebut, dengan upaya agar mereka tidak melakukan aktivitas tersebut kembali dan mendapatkan keterampilan yang layak. Pada masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin pembenahan para gelandangan ini mulai dilakukan. Ali Sadikin beranggapan bahwa para gelandangan ini tidak hanya bisa disingkirkan saja tetapi harus ada upaya penanggulangan terhadap para gelandangan ini.

Dalam penulisan ini, berdasarkan analisis masalah yang telah disebutkan pada latar

belakang mengenai gelandangan di Jakarta pada tahun 1962-1977, permasalahan yang muncul yaitu, bagaimana Proyek Mercusuar mempengaruhi bertambahnya gelandangan di Ibukota? Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemunculan pendatang di DKI Jakarta pada awal kemerdekaan?
2. Bagaimana gelandangan mulai bertambah di DKI Jakarta pada tahun 1960-an?
3. Bagaimana strategi Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani gelandangan pada tahun 1966-1977?

## **METODE**

Permasalahan diatas, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Sejarah. Pada metode penelitian sejarah didalamnya terdapat empat tahapan, yaitu: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan historiografi. Pada tahap pertama penelitian ini yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah dengan data yang relevan yang ada pada lapangan baik dalam bentuk data tertulis maupun lisan. Dalam kejadian sejarah, jejak bukti atau sumber itu sangat penting sekali (Wasino dan Hartatik, 2018:5). Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan beberapa surat kabar, surat Keputusan Gubernur dan beberapa gambar sezaman yang terkait dengan penelitian ini di Perpustakaan Nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Perpustakaan Cikini, Perpustakaan Petojo dan Perpustakaan UI di Depok.

Setelah dilakukan pengumpulan sumber, tahapan selanjutnya yaitu dilakukan verifikasi data terkait sumber yang didapatkan, melalui kritik ekstern dan intern. Data yang dikumpulkan tadi, nantinya akan dilakukan uji antara data yang satu dengan yang lain agar mendapatkan fakta sejarah yang sebenarnya. Tahapan selanjutnya adalah menginterpretasikan atau menyusun rangkaian peristiwa aktual secara analitis dan kronologis. Pada tahap ini diperlukan imajinasi penulis untuk menjelaskan peristiwa secara utuh dan fakta sesuai dengan sumber yang diteliti, sehingga tulisan ini mudah dipahami orang lain. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang dapat dipercaya dari

sumber yang diperoleh untuk mendapatkan interpretasi baru dari sumber yang berbeda. Tahap terakhir, yaitu historiografi, atau penulisan sejarah, menjelaskan dan menuliskan fakta-fakta sejarah yang diperoleh sebelumnya dengan bahasa yang baik dan benar. Historiografi ini ditulis menggambarkan beberapa fakta yang diperoleh sebelumnya oleh historiografi setelah tahap heuristik, verifikasi, dan interpretasi peneliti. Dalam menjelaskan sejarah, peneliti harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa aspek yaitu mengungkapkannya dengan bahasa yang baik, kronologis (sesuai urutan waktu kejadian), mengumpulkan bukti melalui penjelasan sehingga sampai pada pemahaman pembaca, terakhir penulisan sejarah ini bisa diperdebatkan (Abdurrahman, 1999: 171-177).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendatang Menuju Kota Awal Tahun 1960-an**

Jakarta pada tahun 1960-an mengalami perkembangan fisik yang begitu cepat. Hal tersebut dikarenakan proyek mercusuar Presiden Soekarno pada saat itu yang ingin mengedepankan citra Indonesia di mata Internasional. Selain itu, proyek pembangunan dalam rangka Asian Games 1962 juga berupaya mengubah kota Jakarta. Pertambahan penduduk Jakarta yang cukup pesat membuat pemukiman baru di Jakarta bermunculan. Para kaum migran ini membangun rumah di beberapa tanah-tanah kosong ditengah kota atau daerah kampung di sekitarnya, pinggir sungai dan pinggir jalur kereta api. Beberapa pemukiman padat penduduk terdapat di Menteng Wadas, Menteng atas dan Pedurenan (Lubis, 2018: 189). Awalnya perkampungan ini tumbuh pada tahun 1950-an lalu meluas di tahun 1960-an. Selain itu, beberapa daerah di sekitar Pekuburan Menteng Atas, Pekuburan Menteng Pulo, Tebet dan Palbatu terus menjadi pemukiman baru hingga tahun 1960-an (Lubis, 2018: 189). Berdasarkan sensus tahun 1961, jumlah penduduk DKI Jakarta pada saat itu berjumlah 2.973.052 orang dengan kepadatan penduduk 5.152 orang per kilometer (Biro Pusat Statistik, 1962: 4)

Para kaum pendatang di Jakarta awalnya hanya ingin tinggal secara sementara saat berada di Jakarta, namun tidak berselang lama para kaum pendatang ini memutuskan untuk menetap di

Jakarta (Temple, 1986: 83). Mereka yang telah lama di Jakarta biasanya mengajak teman-teman atau anggota keluarganya yang berasal dari desa untuk bergabung dengan mereka di Jakarta (Jellinek, 1986: 93). Sayangnya, kebanyakan pendatang baru kurang mempunyai modal dan keterampilan untuk bisa bersaing di Jakarta. Oleh karena itu, sebagian besar dari para pendatang kebanyakan bergulat pada sektor kerja informal di Jakarta, seperti Pedagang kecil, supir bus, tukang bensin eceran, tukang becak, buruh dan pemulung (Lubis, 2018: 200). Jakarta menjadi kota tujuan mereka karena para pendatang ini merasa bahwa kota ini yang dapat memberikan harapan bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dapat diandalkan (Temple, 1986: 84).

Arus perpindahan penduduk yang tinggi dengan tidak disertainya perluasan kerja yang memadai menimbulkan suatu permasalahan tersendiri di Jakarta. Akibat dari ketimpangan ini, arus perpindahan penduduk di kota telah menimbulkan masalah pengangguran dan akibat negatif lainnya (Marbun, 1990: 58). Tingginya tingkat urbanisasi di satu pihak dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan di pihak lain, telah menjadikan kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta menjadi semacam tangkai penampung berbentuk kantong-kantong daerah miskin dalam kota berupa perkampungan liar dengan gubuk-gubuk dan daerah gelandangan (Karamoy, 1983: 76). Diantara para pendatang yang paling beruntung adalah mereka yang memiliki modal yang cukup dan kenalan yang berada di Jakarta. Sedangkan, mereka yang paling tidak beruntung yaitu mereka yang tidak mempunyai modal dan kenalan saat berada di Jakarta (Suparlan, 1984: 50-51). Pendatang desa ke kota yang pendidikannya rendah, dan kurang mempunyai *skill* menyebabkan mereka tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Para pendatang ini mengerjakan apa saja untuk menyambung hidupnya. Diantaranya, mengumpulkan barang bekas, puntung rokok, mengemis dan pekerjaan lainnya. Mereka yang tidak mempunyai pendapatan dan keterampilan yang memadai untuk membeli rumah di kota akibatnya harus tidur di jalanan, perkampungan gembel dan pemukiman liar (Adams, 1984: 95). Mereka biasanya lebih disebut sebagai gelandangan.

### **Kehidupan Para Gelandangan di Ibukota**

Pada awal tahun 1960-an beberapa gelandangan membentuk sebuah komunitas tersendiri sekitar 300 meter dari Istana Negara, di Jalan Merdeka utara (Suparlan, 1984: 231). Sisanya para gelandangan ini menyebar di beberapa tempat di Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan (Hanggoro, 2011: 57). Para gelandangan ini biasanya terkonsentrasi di tempat-tempat yang ramai seperti di Gunung Sahari, Senen, Salemba, Matraman dan Tanah abang (Hanggoro, 2011:57). Gelandangan yang bermunculan di Jakarta, datang dengan berbagai alasan. Alasan tersebut seperti mencari pengalaman di kota, cerainya pernikahan bahkan ada yang didorong sikap malas karena mencari pendapatan yang gampang saja di Jakarta (Rebong, Elena dan Mangiang, 1984: 197). Para gelandangan ini biasanya membangun gubuk setengah permanen atau gubuk setengah sementara untuk berteduh dan melindungi diri. Di depan gubuk-gubuk selalu terdapat tumpukan-tumpukan kertas, pecahan kaca, potongan seng dan sebagainya. Ini biasanya menandakan mata pencaharian mayoritas gelandangan yang biasanya memungut sampah bekas yang ada nilai jualnya untuk dijual kembali kepada beberapa lapak.

Para gelandangan di Jakarta ini, kebanyakan dari mereka merupakan pendatang yang berasal dari Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan perpindahan penduduk desa-desa di Jawa lebih mudah dilakukan, daripada para penduduk di luar Jawa. Mereka para penduduk yang berasal dari Jawa bisa pulang-pergi dari desa ke kota dengan ongkos yang lebih murah apabila mengalami kegagalan usaha di Jakarta. Hal ini sukar didapatkan oleh para pendatang yang berasal dari luar Jawa. Atas pertimbangan inilah pola penduduk di luar Jawa biasanya bersifat menetap (Effendi, 1984: 82). Pendatang musiman atau sementara yang berasal dari desa-desa di Pulau Jawa biasanya bersedia tinggal dimana saja di Jakarta, asalkan dapat berlindung dari hujan dan terik matahari. Mereka terkadang harus menjalani hidup berpindah-pindah di Jakarta atau mendirikan gubuk-gubuk sementara di kota. Inilah yang menimbulkan kesan bagi para pendatang sebagai gelandangan. Parsudi Suparlan

pada tahun 1961 mengelompokkan asal daerah para gelandangan yang berada di sekitar 300 meter dari Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, dan kebanyakan dari mereka berasal dari desa-desa di Jawa (Suparlan, 1984: 231). Jumlah para gelandangan ini bertambah pesat sejak awal 1960. Mereka mendirikan gubuk-gubuk liar di beberapa tempat, mendirikan kampung-kampung kumuh padat penduduk (baik tanah yang sah maupun tidak sah), dan sisanya memilih tidur di jalan-jalan, kolong jembatan, kolong gerbong tua dan ditempat umum lainnya (*Djaja*, 12 Maret 1966: 42).

Dalam dunia gelandangan, terdapat beberapa pekerjaan atau mata pencaharian yang membedakan dengan golongan masyarakat kota lainnya. Para gelandangan ini biasanya mengumpulkan barang-barang bekas yang masih ada nilai jualnya, puntung rokok, dan menjadi pelacur bagi gelandangan wanita. Bagi gelandangan yang mencari barang-barang bekas, biasanya mereka memungut dari tengah jalan, tempat pembuangan sampah maupun pekarangan penduduk. Biasanya para gelandangan ini mengambil barang-barang bekas seperti: logam, pecahan kaca, plastik botol, potongan kayu ataupun kertas. Barang-barang bekas yang telah dikumpulkan biasanya mereka jual di lapak-lapak yang mereka tentukan (Rebong, Elena dan Mangiang, 1984: 187). Selain itu, bagi beberapa gelandangan yang memiliki relasi dapat bekerja sebagai calo transportasi umum, tukang becak dan pedagang kaki lima. Bahkan ada beberapa gelandangan yang terlibat langsung dengan kegiatan kejahatan yang dilakukan baik individual maupun secara berkelompok (Suparlan, 1984: 52). Para gelandangan ini biasanya membentuk suatu komunitas tersendiri didalamnya. Biasanya para gelandangan ini juga memiliki peraturan sendiri dalam komunitasnya, misalnya suatu daerah gelandangan tertentu akan dilarang masuk oleh gelandangan lain untuk tinggal di daerah tersebut, terkecuali gelandangan tersebut mendapatkan izin dari penduduk lama atau gelandangan lama yang telah tinggal di daerah tersebut sebelumnya.

Para gelandangan Jakarta ini biasanya dalam sub kultur mereka, terdapat struktur kekuasaan didalamnya yang harus dipatuhi oleh para gelandangan tersebut. Para jagoan, centeng,

hansip, rentenir dan pelindung adalah unsur-unsur kekuasaan dalam sub kultur gelandangan tersebut (Wirosardjono, 1984: 64). Dalam studi yang diteliti oleh Parsudi Suparlan pada pemukiman gelandangan di tahun 1960, mereka para gelandangan yang memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada tetangganya biasanya akan meminjamkan uangnya kepada para tetangganya yang membutuhkan. Lama kelamaan karena struktur ekonomi masyarakat gelandangan yang tidak beraturan dan miskin membuat beberapa orang yang dipinjami ini tidak dapat mengembalikan uang terhadap si peminjam tersebut. Hutang tersebut menjadi lebih kronis dan hubungan antara si peminjam dengan yang dipinjamkan tersebut menjadi hubungan *patrons-clients*. Mereka yang memberikan pinjaman tersebut dapat menjadi tokoh berpengaruh dalam lingkungannya dikarenakan hubungan *patrons-clients* tersebut (Suparlan, 1984: 239).

Pemerintah berusaha mengatasi menumpuknya para gelandangan di Jakarta melalui gerakan bernama Komando Penampungan pendidikan dan Penyaluran Tuna Karya (Ko P3TK). Gerakan ini berjalan untuk menanggulangi gelandangan di Jakarta. Rencana ini terdiri dari dua rencana, yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana Jangka panjang gerakan ini berfokus pada penanggulangan gelandangan dengan cara yang lebih manusiawi dengan menempatkan gelandangan ke beberapa tempat penampungan (*Djaja*, 12 Maret 1966: 42). Untuk rencana jangka pendeknya, pemerintah berusaha menangani jumlah gelandangan yang menumpuk menjelang pelaksanaan CONEFO. Pemerintah juga berusaha membuat *Master Plan Regional Metropolitan* pada tahun 1966 untuk bekerja sama dengan kota di sekitar Jakarta dalam rangka untuk mengimbangi kepadatan penduduk di Jakarta. Daerah ini difokuskan di Cibinong dan Citereup untuk dijadikan daerah baru yang dapat mengimbangi Jakarta. Namun kondisi tersebut gagal terlaksana diakibatkan kondisi penduduk yang semakin bertambah di Jakarta (*Djaja*, 26 Maret 1966: 24-32).

### **Strategi Penanganan Gelandangan Pada Masa Ali Sadikin**

Usaha penertiban gelandangan yang dilakukan pada masa Ali Sadikin, mendapatkan perhatian yang serius. Pada saat ia memimpin menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966, ia tidak heran dengan kondisi Jakarta yang masih memiliki banyak sekali masalah penyakit sosial. Ali Sadikin beberapa kali mencetuskan beberapa kebijakan yang berlawanan dan tidak membela rakyat kecil, karena kebijakan tersebut masalah gelandangan di Jakarta dapat ditangani sedikit demi sedikit (Komariyah, 2021: 55). Ali sadar bahwa dia menyadari tugasnya sebagai pemimpin di Jakarta tidak mudah. Kepercayaan pada pemerintah saat itu merosot dengan seiring menurunnya kondisi perekonomian (Ramadhan, 1993: 508). Namun, Ali Sadikin beruntung dikarenakan memiliki rencana induk jangka panjang yang telah dibuat sejak tahun 1965. Rencana induk jangka panjang tersebut memuat penggunaan tanah yang meliputi rumah tinggal, tempat perkantoran, industri, tempat rekreasi, jalur komunikasi dan sebagainya. Dengan adanya rencana induk ini, dapat ditarik mengenai masalah yang harus diprioritaskan dengan segera (Hanggoro, 2011: 67). Salah satu bagian dari rencana induk jangka panjang tersebut yaitu program perbaikan kampung.

Ali Sadikin hampir mengalah dengan populasi penduduk di Jakarta yang bertambah banyak. Untuk memperbaiki hal ini, Ali mengkombinasikan program perbaikan kampung dan pengurangan elemen yang tidak diinginkan dari sektor informal yang melibatkan warga miskin kota (Blackburn, 2012: 302). Gagasan perbaikan kampung ini mulai direncanakan Ali pada tahun 1968. Gagasan ini sempat ditolak oleh Pemerintah melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dikarenakan minimnya anggaran pemerintah yang ada. Program ini baru terlaksana pada tahun 1969 berjalan dengan derasnya investasi asing yang mulai masuk ke Jakarta. Kas Daerah yang mulai menggemuk dikarenakan pelegalan judi di Jakarta membuat program perbaikan kampung ini mulai berjalan pada tahun 1969. Kebijakan ini muncul untuk mencegah arus urbanisasi yang semakin menderas dan mencegah tumbuhnya pemukiman baru di Jakarta. Ali Sadikin mulai melakukan perbaikan pemukiman-pemukiman kumuh di Jakarta yang menyebabkan timbulnya lingkungan baru gelandangan. Ali

memilih kampung-kampung dengan kondisi yang paling jelek, yang tidak memiliki jalan beraspal, tempat MCK dan air bersih yang sukar (Hanggoro, 2011: 76). Program perbaikan kampung ini berhasil dilakukan di beberapa wilayah di Jakarta seperti di Kampung Jawa, Bali Matraman, Kartini, Pademangan dan Keagungan. Program perbaikan kampung ini nantinya berganti nama menjadi Proyek Mohammad Husni Thamrin pada tahun 1974, yang namanya diambil dari salah satu Pahlawan Nasional asal Betawi. Program ini mendapatkan bantuan dari Bank Dunia pada tahun tersebut dikarenakan kesuksesannya dalam bidang sosial ekonomi (Blackburn, 2012: 303).

Selain Program perbaikan kampung, Ali Sadikin juga masih melakukan razia untuk menertibkan gelandangan di Jakarta. Pemberlakuan razia ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1b.13/3/42/1967 tentang prosedur dalam menangani gelandangan di Jakarta. Dalam melakukan razia, diperlukan koordinasi dari berbagai pihak agar dapat berlangsung dengan lancar saat razia dilakukan. Larangan ini semakin diperkuat dengan munculnya larangan pengemis di Jakarta dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Ca. 7/1/16/72. yang melarang segala bentuk aktivitas mengemis diseluruh wilayah di Jakarta. Melihat banyaknya gelandangan yang berprofesi sebagai pengemis di Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta harus memikirkan rencana yang matang untuk menertibkan pengemis yang sudah terlanjur berkeliaran di wilayah DKI Jakarta (Komariyah, 2011: 88). Melalui implementasi Surat Keputusan Gubernur diatas, maka Pemerintah DKI Jakarta berusaha melarang segala bentuk aktivitas mengemis di wilayah DKI Jakarta dan menugaskan kepada Direktorat II beserta para Walikota dan instansi terkait lainnya untuk melaksanakan isi dari surat ini dalam bentuk razia, pembersihan dan lain-lain. Ali Sadikin juga menghimbau kepada masyarakat jika ingin bersedekah, maka untuk penyaluran sedekah tersebut dapat disalurkan melalui badan sosial swasta maupun badan-badan sosial pemerintah. Sepanjang operasi gelandangan dilakukan dari tahun 1972-1977. Pemerintah DKI Jakarta

setidaknya telah berhasil menjaring sebanyak 76.089 gelandangan di DKI Jakarta.

Tahun	Operasi	Terjaring	Ditampung	Disalurkan	Dikirim ke daerah asal	Dititipkan ke luar Jakarta	Dinikahkan
1972	467	20.408	6.663	787	1.065	11.893	71
1973	244	14.320	5.520	1.999	4.272	3.099	811
1974	172	1.752	6.514	2.010	3.228	-	832
1975	239	14.786	3.565	1.941	8.010	1.276	816
1976	91	10.239	705	1.270	8.264	-	495
1977	35	4.284	728	740	2.816	-	259
Total	1.248	76.089	23.659	8.747	27.655	16.268	3.274

Ali Sadikin juga melakukan salah satu kebijakan kontroversial lain, yaitu memberlakukan Jakarta sebagai daerah tertutup melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1b.3/1/27/1970. Selain, melakukan kebijakan Jakarta sebagai kota tertutup, Ali sadikin juga menggalakan program Keluarga Berencana (KB) untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk di Jakarta (Lubis, 2018: 322). Ali Sadikin mengumumkan bahwa semua warga harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar bisa membuktikan bahwa mereka merupakan penduduk tetap yang diizinkan tinggal di Jakarta. Beberapa anggota penertiban sering melakukan razia terhadap para imigran ilegal yang kemudian dikembalikan ke daerah asal mereka. Selain itu, dimulai pula operasi pembebasan jalanan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan berbasis jalanan seperti Pedagang kaki lima, tukang becak, pengemis dan gelandangan. Awalnya kebijakan ini sempat ditakuti oleh para kaum pendatang di Jakarta, namun seiring berjalannya kebijakan ini muncul pemalsuan KTP diantara para penduduk di Jakarta dan kebijakan ini dinilai tidak terlalu berdampak (Blackburn, 2012: 301-302).

Program lain yang dilakukan untuk meminimalisir gelandangan di Jakarta yaitu program rehabilitasi. Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial yang ada di Jakarta untuk menampung dan memenuhi kebutuhan para gelandangan saat menjalani masa bimbingan atau rehabilitasi. Selain itu bagi beberapa gelandangan yang memerlukan perawatan, penanganan bisa dilaporkan melalui Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta. Penanganan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.Ca.4/1/44/69. Nantinya para gelandangan ini akan dirawat di

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Untuk gelandangan yang dinyatakan sembuh nantinya akan dikirim ke tempat penampungan di Panti Sosial IV menteng atas. Untuk gelandangan yang memerlukan perawatan lebih lanjut nantinya akan dikirim ke Rumah Sakit Budi Asih Cawang III. Bagi gelandangan yang sudah berusia lanjut nantinya akan dikirim ke Rumah Sakit Panti Karya Asuhan Budi di Cengkareng. Selain itu tersebar beberapa lembaga-lembaga sosial yang berada di Jakarta seperti, Panti-Panti Sosial milik Pemerintah DKI Jakarta, Pusat Rehabilitasi Tuna Sosial Mulyadi Joyo-Martono, Lembaga pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu, Panti Pendidikan Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo, Panti Asuhan Khusus Klender, Panti Werdha Cipayung, Panti Laras di Cengkareng dan Cipayung dan Rumah Sakit Sitanala (Baharuddin, 1981: 600-601).

Penanganan terakhir yang dilakukan dalam menangani gelandangan yaitu diadakannya pelatihan kerja dan transmigrasi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pelatihan kerja ini dimaksimalkan untuk mengurangi pengangguran di Jakarta dengan memberikan keterampilan kepada mereka. Dalam menangani masalah ini Pemerintah DKI Jakarta mengadakan beberapa proyek pelatihan kerja, seperti Proyek Latihan Kejuruan(PLK), Proyek Latihan Kerja Keliling, Proyek Latihan Keterampilan Kerja di Jakarta, Proyek Padat Karya, Proyek tenaga kerja sukarela, Proyek desa Pemuda KNPI, Penyuluhan dan pembinaan kepada usaha-usaha swasta, Proyek Kredit Investasi Kecil dan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Baharuddin, 1981: 388-401).

Segala proyek kerja yang dilakukan oleh pemerintah ini diberikan untuk memberikan bimbingan secara mental, keterampilan, dan kerja agar kelak mereka para gelandangan dapat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pada tahun 1974 Pemerintah DKI telah menganggarkan dana sebesar Rp. 335.500.000 untuk 711 Kepala Keluarga. Di tahun 1975 Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Rp. 384.500.000 untuk 769 Kepala Keluarga dengan besaran dana sekitar Rp.350.000 per Kepala Keluarga. Program ini menasar juga bagi para kaum gelandangan yang tidak mau dipulangkan ke daerah asalnya. Namun, program ini juga

memiliki persyaratan untuk dapat mengikutinya, salah satunya menikah, dan memiliki surat bebas G30 S (*Pos Kota*, 17 Februari 1976: 3). Untuk opsi terakhir dari pala gelandangan ini, biasanya mereka dipulangkan kembali ke daerah asal mereka. Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan biaya pemulangan para gelandangan tersebut dari anggaran dana Gubernur DKI Jakarta (*Pos Kota*, 18 Maret 1977: 10).

## KESIMPULAN

Pembangunan dan kondisi sosial ekonomi di Jakarta pada awal tahun 1960-an telah menjadikan Jakarta sebagai kota yang menjanjikan bagi para pendatang yang berasal dari seluruh penjuru di Indonesia. Masih belum stabilnya perekonomian desa-desa di Indonesia, munculnya pemberontakan daerah yang masih sering terjadi seperti DI/TII di Jawa Barat menjadikan beberapa kaum pendatang mulai muncul dan memenuhi Jakarta sebagai usaha untuk memenuhi roda penghidupan mereka. Para pendatang tersebut datang dengan berbagai macam keahlian yang berbeda dan latar belakang yang berbeda, ada juga yang hanya datang mengandalkan tenaga dan fisiknya dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota dibanding di desa. Mereka yang memiliki keahlian dan memiliki bekal yang cukup di kota biasanya akan bisa menjalani kehidupan kota dengan baik dan layak. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki keahlian yang memadai, bekal yang sedikit serta relasi yang bisa membantu mereka, kecil kemungkinan dapat bertahan hidup di kota besar seperti Jakarta ini.

Para gelandangan yang muncul di Jakarta kebanyakan berasal dari pendatang yang bergelut di sektor informal kota seperti pedagang kaki lima, tukang becak hingga pemulung. Hasil pendapatan yang mereka peroleh jauh dari kata cukup untuk membeli rumah di Jakarta. Beberapa dari mereka juga menggunakan sistem pondok atau migrasi sekuler dimana mereka bergantian bekerja dengan rekan mereka ketika kondisi di desa sedang tidak baik-baik saja, selain itu mereka juga biasanya disediakan pondok oleh para majikan mereka untuk bisa bekerja di kota, seperti para tukang becak yang terdapat di Kampung Kebun Kacang pada tahun 1960-an.

Mereka kaum pendatang yang tidak memperoleh kemurahan hati tersebut harus bergelut dengan kerasnya ibukota. Mereka mendirikan perkampungan liar dan kumuh di tanah-tanah milik negara dengan bahan seadanya dan sementara agar sewaktu-waktu dapat dibangun kembali ketika terjadi razia dari pihak keamanan yang ditugaskan pemerintah. Beberapa dari mereka tidur ditaman dan emperan toko untuk sekedar singgah dari kerasnya kehidupan. Mereka biasa disebut para gelandangan. Pendapatan yang tidak menjanjikan membuat para gelandangan ini terpaksa membentuk sebuah komunitas tersendiri di Ibukota dengan tujuan agar bisa bertahan hidup di Jakarta. Salah satu contohnya yaitu pemukiman gelandangan yang diteliti oleh Pasurdi Suparlan sekitar 300 meter di Istana Negara Jalan Merdeka Utara.

Ali Sadikin memulai program perbaikan kampung pada tahun 1969 dengan mencoba memperbaiki beberapa kampung di Jakarta dengan tujuan mencegah tumbuhnya pemukiman kumuh di Jakarta. Nantinya program perbaikan kampung ini menjadi Proyek Mohammad Husni Thamrin yang didanai oleh Bank Dunia pada tahun 1974. Selain melakukan program perbaikan kampung, Ali juga berusaha menutup Jakarta dari para pendatang di tahun 1970. Kebijakannya ini awalnya sempat berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu kebijakan ini semakin menurun dikarenakan kurang patuhnya para penduduk Jakarta dengan memberi akses terhadap pendatang dari luar Jakarta. Serangkaian kebijakan razia terhadap gelandangan juga masih sering dilakukan oleh Ali Sadikin dengan tujuan mengurangi angka gelandangan di Jakarta. Gelandangan yang ditangkap, biasanya akan direhabilitasi di beberapa panti-panti yang tersebar di Jakarta sesuai dengan kriteria gelandangan yang dimaksud. Para gelandangan ini nantinya akan diberikan pelatihan kerja agar dapat lebih produktif kembali ketika dikembalikan ke kehidupan semula. Beberapa gelandangan juga terkadang masuk dalam proses transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah, namun terkadang ada pula beberapa gelandangan yang dipulangkan oleh Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA



### Arsip

- Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1b.3/1/27/1970 tentang Pemberlakuan Jakarta sebagai kota tertutup
- Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Ca. 7/1/16/72 tentang Larangan Pengemisan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.Ca.4/1/44/69 tentang Tata Kerja dan pembidangan Tugas orang-orang terlantar.

### Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999)
- Adams, Charles, *Pertambahan Penduduk dan Penyerbuan Daerah Kota*, dalam Parsudi Suparlan, dkk., *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984)
- Baharuddin, M, *Tuna Wisma/Gelandangan Indonesia: Masalah Penanggulangan*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66, 1981).
- Biro Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 1961*, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/1962/06/06/ba0319372bf4767645160a8c/sensuspenduduk-1961-republik-indonesia.html>, pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 22.08.
- Biro Pusat Statistik Kabinet Menteri Pertama, *Sensus Penduduk 1961*, (Jakarta: Biro Pusat Statistik Kabinet Menteri Pertama, 1962)
- Blackburn, Susan, *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2012).
- Candiwidoro, Rahadian, "Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970)", *Jurnal Pemikiran Sosiologi 4.1*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2017.
- Effendi, Tadjuddin Noer, *Gelandangan: Dampak Ledakan Penduduk*, dalam

- Onghokham, dkk., *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1984)
- Hanggoro, Hendaru Tri, "Masalah permukiman di kota: sejarah permukiman kumuh di Jakarta 1960-1969", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011.
- Harahap, Fitri Ramdhani, "Dampak Urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia", *Jurnal Society*, Vol. I, No. 1, Juni 2013.
- Jacob Rebong, dkk., *Ekonomi Gelandangan: Armada Murah untuk Pabrik*, dalam Parsudi Suparlan, dkk., *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984)
- Jellinek, Lea, *Sistem Pondok dan Migrasi Sirkuler*, dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dkk., *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
- K.H., Ramadhan, *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- Komariyah, Rizka Laili "Kebijakan Penertiban Gelandangan di Jakarta Pada tahun 1972-1977", *Avatara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Volume 4 No 3, 2016.
- Komariyah, Rizka Laili *Memburu Kaum Miskin Kota: Kebijakan Penertiban Gelandangan di Jakarta 1972-1977*, (Pemalang: Dramaturgi, 2021)
- Lubis, Firman, *Jakarta: 1950-1970*, (Depok: Masup Jakarta, 2018)
- Marbun, B.N., *Kota Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: Erlangga, 1990)
- Karamoy, Amir, *Kehidupan Pemuda di Kota Besar*, dalam Sajogyo, dkk., *Sosiologi Pedesaan*, (Bogor: Yayasan obor Indonesia dan Gadjah Mada University Press, 1983)
- Onghokham, dkk., *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1984)
- Parsudi Suparlan, *Gelandangan: Sebuah konsekuensi Perkembangan Kota*, dalam Onghokham, dkk., *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1984)

- Parsudi Suparlan, dkk., *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984)
- Singarimbun, Masri, "Urbanisasi: Apakah itu suatu problema?", *Prisma*, Mei 1977.
- Soetomo, Sugiono, *Urbanisasi dan Morfologi; Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi*, (Yogyakarta: Mobius, 2018)
- Temple, Gordon, Migrasi ke Jakarta, dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dkk., *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
- Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: Dari riset hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018)
- Wirosardjono, Soetjipto, Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan, dalam Onghokham, dkk., *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1984)

**Sumber Koran dan Majalah**

- Djaja, 12 Maret 1966, hlm. 42.
- Djaja, 12 Maret 1966, hlm. 42.
- Djaja, 26 Maret 1966, hlm. 24-32
- Media Jaya Edisi 1 Desember 1977
- Pos Kota, Selasa, 17 Februari 1976, hlm. 3.
- Pos Kota, Jum'at, 18 Maret 1977, hlm. 10

